



PANDUAN

PENGELOLAAN KAMPUNG KB BAGI TENAGA LINI LAPANGAN

PANDUAN PENGELOLAAN
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
BAGI TENAGA LINI LAPANGAN



PANDUAN PENGELOLAAN KAMPUNG KB BAGI TENAGA LINI LAPANGAN

Pengarah:

Penyusun:

Editor:

Cover & Layout:

Cetakan Pertama : 2018

ISBN : --

Diterbitkan oleh:

KATA PENGANTAR



Salam hangat,

SAMBUTAN



Salam hangat,



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	01	Latar Belakang Kerangka Pikir Pengertian Tujuan dan Strategi Sasaran Arah Kebijakan Road Map Indikator Keberhasilan Peran Tenaga Lini Lapangan
BAB II	PERSIAPAN	12	Alur Persiapan Alat Perencanaan Sumber Pembiayaan Teknis Penganggaran
BAB III	PELAKSANAAN	22	Alur Pelaksanaan Integrasi Lintas Sektor Peran dan Tugas Pengurus Pokja Kampung KB
BAB IV	MONITORING DAN EVALUASI	32	Pengertian Monitoring dan Evaluasi Ruang Lingkup Monev Pencatatan dan Pelaporan
BAB V	PENUTUP	36	Penutup Lampiran Daftar Singkatan

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Kampung Keluarga Berencana merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan dan pendidikan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber-KB nya masih rendah.

KAMPUNG KELUARGA BERENCANA SEJALAN DENGAN PELAKSANAAN
AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH
(NAWACITA) BUTIR 3, 5 DAN 8.

NAWACITA

03

Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

NAWACITA

05

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

NAWACITA

08

Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.



“

Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan berbagai program/kegiatan prioritas program KKBPB dan program pembangunan lainnya secara utuh di lini lapangan.

Untuk itu perlu dilakukan koordinasi lintas sektor guna terintegrasinya program yang akan dilaksanakan di lokasi pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana.

”

”



Pengurus Pokja Kampung KB, Desa Bendungan, Kec. Lebak Wangi, Kab. Kuningan, Jawa Barat.

KERANGKA PIKIR

MASALAH

- Jumlah desa sangat tertinggal 13.453 desa dari 74.954 desa (Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun)
- Jumlah penduduk miskin 26,58 juta jiwa (BPS-September 2017) dan lebih banyak di perdesaan
- Usia kawin pertama yang masih tinggi di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun (Susenas - BPS 2012).
- Masih rendahnya kesertaan ber-KB
- Masih tingginya angka gizi buruk dan stunting



UPAYA MENGATASI MASALAH

01

Presiden mengamanatkan perlunya upaya kreatif dan integratif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga untuk mengatasinya perlu:

1. Komitmen bersama
2. Pendekatan kewilayahan, bermula dari daerah dan desa
3. Berbasis keluarga
4. "Beyond Family Planning"
5. Partisipasi masyarakat



PROGRAM DAN KEGIATAN

02

Pelaksana:

1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Daerah
3. Pemerintah Desa

Program dan Kegiatan:

1. Pelayanan Dasar
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Pembangunan Keluarga Sejahtera



MASALAH DAN DAMPAK

03

- Perluasan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar
- Penciptaan Upah Tambahan Pendapatan
- Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Masyarakat
- Terwujudnya Keluarga Sejahtera

“

PENGERTIAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

Satuan wilayah setingkat desa/kelurahan atau yang setara dengan kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan antara program KKBPK dan program pembangunan sektor terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

”



Kampung KB Desa Lantung, Kecamatan Lantung
Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat

TUJUAN DAN STRATEGI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui:

- Pelayanan dasar dan program KKBPK
- Penguatan 8 Fungsi Keluarga
- Partisipasi Aktif Masyarakat
- Pembangunan yang terintegrasi antar lintas sektor

SASARAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

SASARAN LANGSUNG

1. Keluarga
2. Pasangan Usia Subur (PUS)
3. Balita, Remaja dan Lansia
4. Masyarakat

SASARAN TIDAK LANGSUNG

1. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/
Tokoh Adat
2. Organisasi masyarakat
3. Penyedia Layanan kesehatan

TENAGA LINI LAPANGAN

Pelaksanaan program KKBPK di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari upaya penggerakan di tingkat lini lapangan di mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program KKBPK merupakan langkah yang sangat strategis guna mencapai tujuan program KKBPK. Tiga aspek yang menjadi sasaran penggerakan lini lapangan meliputi:

1. Sumber Daya Manusia Lini Lapangan yaitu Tenaga Lini lapangan (PKB/PLKB) sebagai petugas yang diberikan mandat untuk menggerakkan masyarakat dalam program KKBPK.
2. Pembinaan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program KKBPK di lini lapangan.
3. Mekanisme Operasional sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program KKBPK di lapangan.



Tim Pokja Kampung KB Kamuning Asri, Desa Bendungan
Kecamatan Lebak Wangi Kab. Kuningan - Jawa Barat.

PERAN PKB/PLKB DALAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA



10 LANGKAH PLKB

Sumber :

Pada dasarnya peran PKB/PLKB dalam Kampung Keluarga Berencana tidak berbeda dengan konsep 10 Langkah PLKB. Sehingga hal ini bukanlah sesuatu yang baru atau menambah beban kerja dari PKB/PLKB. Peran PKB/PLKB lebih ditekankan pada bagaimana tujuan dari Kampung Keluarga Berencana dapat terwujud melalui program KKBPK.

"Apabila tidak ada PKB/PLKB yang bertugas di desa tersebut, maka peran PKB/PLKB pengelolaan program Kampung Keluarga Berencana diambil alih oleh IMP."

INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

SEKTOR KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), Sub-PPKBD dan Kelompok KB seperti Kelompok KB Pria dalam program Kampung Keluarga Berencana tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilaksanakan selama ini, terutama dalam kegiatan:

1. Pertemuan Rutin
2. KIE dan Konseling
3. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran serta Potensi Wilayah
4. Pelayanan KKBPK dan sektor lainnya
5. Pengembangan Poktan dan Pokjanis
6. Kemandirian



1

PERSIAPAN

1. Advokasi kepada Kepala Desa, tokoh formal dan informal (Langkah 1 dan 3)
2. Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berencana (Langkah 4 dan 7)
3. Penyusunan Rencana Kerja Kampung Keluarga Berencana (Langkah 2 dan 5)

2

PELAKSANAAN

4. Advokasi kepada Lintas Sektor di tingkat Kabupaten/Kota
5. Sosialisasi Kampung Keluarga Berencana (Langkah 6)
6. Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana (Langkah 8 dan 9)

3

MONITORING DAN EVALUASI

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Langkah 10)



Kolam Ikan Pokja Kampung KB,
Desa Bendungan, Kab. Kuningan - Jawa Barat.

PERSIAPAN

ALUR PERSIAPAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI TINGKAT DESA



1. Advokasi kepada Kepala Desa serta Tokoh Formal dan Informal

Advokasi di tingkat Desa merupakan langkah awal dan penting untuk dilakukan mengawali Kampung Keluarga Berencana, mulai dari:

- Kepala Desa,
- Tokoh formal (BPD, PKK, Bidan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dll)
- Tokoh informal (tokoh agama, pemimpin adat, dan tokoh masyarakat lainnya) guna mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana.
- Advokasi ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan Kepala Desa serta tokoh formal dan informal terhadap pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana.

Peran Tenaga Lini Lapangan dalam Advokasi Kepala Desa

- Menyiapkan informasi dan data tentang “apa itu Kampung Keluarga Berencana dan mengapa penting untuk dilaksanakan di wilayah yang ditunjuk” untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak tersebut diatas.
- Melalui pertemuan di tingkat desa/kecamatan, lakukan advokasi kepada Kepala Desa serta tokoh formal dan informasi dengan informasi dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Contoh Advokasi Kampung KB

Desa Lesabela, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

PLKB bersama-sama Tim Kampung KB Desa Lesabela dalam melakukan sosialisasi selalu melibatkan tokoh agama/masyarakat desa. Tujuannya tentu agar lebih didengar oleh warga.

“
Syukurlah advokasi kami kepada para tokoh ini berhasil, sehingga mereka berkomitmen untuk mendukung Kampung Keluarga Berencana, termasuk membantu dalam melakukan sosialisasi dengan warga.

”

2. Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berencana

- Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana membutuhkan sebuah kelompok kerja (Pokja) atau pengurus Kampung Keluarga Berencana yang harus disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Pokja Kampung Keluarga Berencana beranggotakan para pemangku kepentingan di tingkat desa yang berasal dari perwakilan pemerintah, tokoh agama/tokoh masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat dan individu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing, namun tujuannya tetap mengacu pada pelaksanaan 8 Fungsi Keluarga.
- Jika sudah ada Pokja serupa, sebaiknya memanfaatkan Pokja yang sudah ada/terbentuk tanpa harus membentuk Pokja yang baru.
- Tenaga Lini Lapangan tidak masuk dalam struktur Pokja, karena posisi mereka adalah sebagai pendamping Pokja.

Peran Tenaga Lini Lapangan dalam Pembentukan Pokja

Bersama Kepala Desa mengundang lintas sektor terkait di tingkat desa dalam pertemuan untuk:

- a. membentuk Pokja Kampung Keluarga Berencana
- b. membuat SK Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berencana.

Contoh SK Pokja Kampung KB di Tingkat Desa

Terlampir

Tugas dan Tanggung jawab Pokja Kampung Keluarga Berencana

Kampung Keluarga Berencana harus dikelola secara terus menerus oleh pengurus Pokja Kampung Keluarga Berencana termasuk lintas sektor terkait melalui penerapan 8 Fungsi Keluarga.

1. Menyusun rencana kerja Kampung Keluarga Berencana harus disinkronisasi dengan RPJM Desa sehingga integrasi rencana kerja ini kedepannya akan mendorong kemandirian, kepemilikan dan keberlanjutan.
2. Melakukan advokasi kepada kepala desa untuk menganggarkan kegiatan Kampung Keluarga Berencana melalui APB Desa, termasuk untuk mendanai operasional pokja.
3. Rencana kerja Kampung Keluarga Berencana yang telah disusun menjadi panduan pengurus Pokja dalam mengelola Kampung Keluarga Berencana.
4. Melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program kerja dalam upaya peningkatan capaian Kampung Keluarga Berencana di tingkat desa.

Susunan Pengurus Pokja Kampung Keluarga Berencana

Penanggung Jawab: Kepala Desa/Lurah

• Penasehat :	dipilih
• Ketua :	dipilih
• Sekretaris :	dipilih
• Bendahara :	dipilih
• Seksi Agama :	dipilih
• Seksi Pendidikan :	dipilih

• Seksi Reproduksi :	dipilih
• Seksi Ekonomi :	dipilih
• Seksi Perlindungan:	dipilih
• Seksi Kasih Sayang :	dipilih
• Seksi Sosial Budaya :	dipilih
• Seksi Lingkungan :	dipilih



Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja Tim Kampung KB Kabupaten Kuningan, Jawa Barat



Hasil Pemetaan Lokasi Kampung KB

3. Penyusunan Rencana Kerja Kampung Keluarga Berencana

Pokja di tingkat desa yang sudah terbentuk akan membutuhkan rencana kerja dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu dengan alat yang diberi nama Kampung Keluarga Berencana diharapkan dapat membantu Pokja untuk menyusun strategi dan kegiatan dalam menyukseskan pembangunan di Kampung Keluarga Berencana. Keluarannya adalah rencana kegiatan tahunan untuk Kampung Keluarga Berencana.

Peserta yang terlibat dalam penyusunan rencana kerja adalah lintas sektor di tingkat desa adalah Kepala desa, perangkat desa, BPD, PKK, Kader KB/Kesehatan, Bidan dan tokoh agama/tokoh masyarakat atau Pokja Kampung Keluarga Berencana di desa. Peserta dalam kelompok sebanyak 7-8 orang. Diskusi mengutamakan keterlibatan aktif setiap peserta. Pelaksanaan kegiatan ini idealnya dilakukan selama 2 hari (masing-masing 8 jam/hari).

Peran Tenaga Lini Lapangan dalam Penyusunan Rencana Kerja

- Menjadi pendamping Pokja Kampung Keluarga Berencana dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kampung Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pokja di tingkat kabupaten/kota.
- Setelah mendapatkan pelatihan, Tenaga Lini Lapangan bisa menjadi fasilitator dalam penyusunan Rencana Kerja Kampung Keluarga Berencana di tingkat desa.



ALAT PERENCANAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

TAHAP 1 PEMETAAN DAN PERUMUSAN ISU

1



Mengidentifikasi
sasaran wilayah
& sasaran langsung

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat mengidentifikasi wilayah dan penerima manfaat Kampung KB.

2



Menggambar peta desa
dan wilayah kampung KB

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat menggambarkan peta desa dan wilayah Kampung KB, lengkap dengan batas wilayah, sungai, jalan, jembatan serta batas Dusun atau RW tertentu yang disepakati menjadi sasaran Kampung KB.

3



Mengidentifikasi
Sarana dan Prasarana

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat mengidentifikasi dan menggambarkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan desa (Balai Desa, Puskesmas, Sekolah, Tempat Ibadah, Posyandu, dsb)

4



Mengidentifikasi
Data Kependudukan

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat mengidentifikasi data kependudukan dan KB yang ada di desa terutama di wilayah Kampung KB.

5



Mengidentifikasi program
pembangunan &
pemberdayaan masyarakat

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat mengidentifikasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa terutama di wilayah Kampung KB

6



Mengidentifikasi Isu

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat menentukan isu/permasalahan utama yang muncul setelah mempelajari dan menganalisis peta hasil yang telah disusun sebelumnya (langkah 1-5).

Alat SMART terdiri dari 2 tahap dan 12 langkah. Tahap pertama yaitu pemetaan dan perumusan isu dan tahap kedua yaitu penyusunan rencana kerja. Setiap tahapan akan mendorong peserta untuk bertukar pendapat dengan peserta lain dan mulai terjalin pembahasan kondisi lokasi Kampung KB serta merumuskan rencana kegiatan untuk menjawab permasalahan.

TAHAP 2 PENYUSUNAN RENCANA KERJA

7



Menetapkan Tujuan

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat menetapkan Tujuan Jangka Panjang dan Tujuan Jangka Pendek dengan mengacu pada perumusan isu utama di langkah 6.

8



Analisa Potensi dan Tantangan

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat melakukan analisa potensi dan tantangan baik di tingkat internal dan eksternal Pokja yang dikaitkan dengan tujuan yang ditentukan di Langkah 7.

9



Menyusun Rencana Kerja

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat menyusun rencana kerja Kampung Keluarga Berencana berdasarkan Analisa Potensi dan Tantangan di Langkah 8.

10



Menentukan Indikator Keberhasilan

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat menentukan indikator kemajuan/keberhasilan dari rencana kerja/kegiatan yang telah disusun.

11



Menyusun Tahapan Kegiatan

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat menentukan tahapan kegiatan yang logis dan berurutan jadwalnya.

12



Menyusun Rencana Tindak lanjut

Tenaga Lini Lapangan memfasilitasi Pokja untuk dapat membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) tentang hal apa saja yang perlu dan penting dilakukan setelah rencana kerja Kampung Keluarga Berencana tersusun, sebelum pada akhirnya disahkan dan diterapkan.

SUMBER PEMBIAYAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

APBD I dan II

- Dana dari berbagai OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung Kampung Keluarga Berencana.
- Dana Perimbangan yang disalurkan melalui Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD.

Dana CSR

- Corporate Social Responsibility (CSR) adalah dana yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk memberikan tanggung jawabnya kepada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
- Dana CSR diberikan pada program/kegiatan yang bertujuan untuk membangun perbaikan kesejahteraan atau penguatan ekonomi sosial masyarakat.
- Tehnis Mendapatkan Pendanaan CSR : Membuat proposal mengenai program/kegiatan yang tertera di rencana kerja Pokja Kampung Keluarga Berencana yang pembiayaannya bisa didanai oleh CSR.

APBDesa

- Penggunaan APB Desa untuk pembiayaan program/kegiatan Kampung Keluarga Berencana, dilakukan secara swakelola, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berencana di Desa yang menggunakan APB Desa dilakukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berencana.

Dana BOKB

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik berupa biaya operasional integrasi program KKBPK dengan program pembangunan lainnya di Kampung Keluarga Berencana yang kegunaannya ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan dukungan operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dan dukungan media KIE dan manajemen BOKB.

TEKNIS PENGANGGARAN DARI SUMBER APBDesa

Desa telah menetapkan APBDesa

Tetap dapat menyusun rencana kerja Pokja Kampung KB yang pendanaannya dapat diusulkan dalam perubahan anggaran di tingkat Desa.

Desa belum menetapkan APBDesa

Menyusun rencana kerja Pokja Kampung KB dan pendanaannya dapat diusulkan dalam Musrembang Desa sesuai dengan ketentuan yang ada.

Peran Tenaga Lini Lapangan dalam Pembiayaan Kampung KB

- Mendampingi Kepala Desa/Lurah dan Pokja dalam menyampaikan rencana kerja Pokja Kampung Keluarga Berencana dengan OPD yang terlibat dalam Kampung Keluarga Berencana melalui Pokja di Tingkat Kabupaten/Kota agar mendapatkan dukungan berdasarkan kebutuhan di lokasi Kampung Keluarga Berencana.
- Mendampingi Pokja dalam Musrembang Desa/Kelurahan agar Rencana Kerja Kampung Keluarga Berencana mendapat dukungan pendanaan dari desa/kelurahan.

PELAKSANAAN

ALUR PELAKSANAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI TINGKAT DESA





INTEGRASI LINTAS SEKTOR

Mendorong keterlibatan, inisiatif, dan kepemilikan lokal penting dilakukan untuk mendukung Kampung Keluarga Berencana, mengingat banyak aspek yang harus diperhatikan dalam program ini, di tengah masih adanya tantangan ego sektoral yang kadang terjadi.

Selain itu juga karena, pada dasarnya masyarakat dan pemerintah daerah tersebutlah yang lebih memahami situasi, kebutuhan serta tantangan dalam melaksanakan Kampung Keluarga Berencana di wilayahnya.

Untuk itu, perlu strategi yang tepat, salah satunya dengan membentuk kelompok kerja lintas sektor baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Tujuannya agar terjalin kerjasama dan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana.

Berikut gambaran keanggotaan, peran dan tugas kelompok kerja mulai dari tingkat Kabupaten/kota sampai dengan desa:

PERAN DAN TUGAS PENGURUS POKJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

POKJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA	Tingkat Kabupaten/Kota (Disahkan dengan SK Bupati/Walikota)	Peran dan Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Perencana strategi advokasi • Pelaksana kegiatan advokasi • Pemantau kegiatan advokasi
		Pengurus Pokja Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Daerah, Bappeda, DinKes, OPD KB, DPMPD dan Dinas terkait lainnya • Organisasi Profesi (contoh: IBI, IDI, POGI) • Organisasi Masyarakat, Keagamaan, LSM • Universita/Perguruan Tinggi
	Tingkat Desa (Disahkan dengan SK Kepala Desa)	Peran dan Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Perencana strategi advokasi • Pelaksana kegiatan advokasi KB • Pelaksana kegiatan Kampung Keluarga Berencana
		Pengurus Pokja Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa/Sekretaris • BPD • Bidan Desa • PKK • Kader KB Kesehatan • Babinsa • Bhabinkamtibmas • Toga/Toma/Todat



Pokja Kampung Keluarga Berencana di tingkat kecamatan juga dapat dibentuk jika diperlukan berdasarkan situasi dan kebutuhan spesifik daerah guna mendukung pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di tingkat desa.



Fungsi Kelompok Kerja (Pokja)

Sebagai forum lintas sektor, Pokja diharapkan memiliki kesamaan persepsi tentang “penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa, serta keluarga sebagai pondasi pertama dan utama dalam upaya perubahan bangsa”.

Oleh karena itu perlu untuk melakukan advokasi terhadap para pemegang kebijakan tentang pentingnya pengelolaan program KKBPK sebagai salah satu penentu tercapainya program pembangunan sektor lain maupun pembangunan wilayah.

Dengan adanya Pokja diharapkan nantinya dapat :

- Menyelaraskan kebijakan dan kegiatan di masing-masing OPD untuk Kampung Keluarga Berencana
- Memfasilitasi terselenggaranya program KKBPK yang terintegrasi dengan program lintas sektor di Kampung Keluarga Berencana
- Memotivasi lintas sektor dan masyarakat untuk melakukan perubahan secara bersama-sama menuju masyarakat sejahtera
- Membina dan mengevaluasi pelaksanaan integrasi program KKBPK dengan program lainnya dalam kerangka pembangunan wilayah dan masyarakat Kampung.

1. Advokasi Kepada Lintas Sektor

Dukungan dari lintas sektor terkait terutama dari tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di tingkat desa sangat penting, mengingat OPD yang ada juga mempunyai berbagai program pembangunan di tingkat desa.

Melakukan pertemuan konsultasi dengan OPD yang terkait Kampung Keluarga Berencana atau dengan Pokja Kampung Keluarga Berencana di tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan dukungan.



Peran Tenaga Lini Lapangan dalam Advokasi Lintas Sektor

Mendampingi Kepala Desa dan Pokja dalam menyampaikan rencana kerja Pokja Kampung Keluarga Berencana dengan OPD yang terlibat dalam Kampung Keluarga Berencana melalui Pokja di tingkat kabupaten/kota agar mendapatkan dukungan berdasarkan kebutuhan dilokasi Kampung Keluarga Berencana

Contoh Advokasi Lintas Sektor

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan,
Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat:

“

Pada tahun 2018, rencananya 1-2 lokasi Kampung Keluarga Berencana mendapatkan dukungan dari program U-mina, Bu-mina dan Biofolk, dimana dinas akan memberikan dukungan berupa pembuatan kolam budidaya, serta pemberian bibit tanaman sayur dan buah kepada warga desa.

Sasaran program ini sebanyak 20-25 kepala keluarga di setiap desa. Adapun proses pendampingan biasanya dilakukan pada satu siklus, mulai dari tahap pembuatan kolam, pemeliharaan, hingga proses panen.

”



Pemanfaatan Lahan Desa untuk Kolam Ikan
Kampung KB Desa Bendungan, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Kuningan - Jawa Barat

2. Sosialisasi Kampung KB

Sosialisasi tentang Kampung Keluarga Berencana kepada warga masyarakat penting untuk dilakukan sebelum membentuk Kampung Keluarga Berencana, mengingat masih banyak dari mereka yang belum memahami seperti apa sebenarnya Kampung Keluarga Berencana.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai pertemuan di tingkat RT dan RW/Dusun dengan menambahkan agenda tentang apa itu Kampung Keluarga Berencana, tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka pendek dan panjang.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kampung Keluarga Berencana dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana.

Peran Tenaga Lini Lapangan dalam Sosialisasi Kampung KB

Membantu Kepala Desa dan Pokja dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Kampung Keluarga Berencana di tingkat RT dan RW/Dusun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman akan Kampung Keluarga Berencana dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Contoh Advokasi Lintas Sektor

Camat Lantung, Kab. Sumbawa, Prov. NTB:

Agar warga tertarik, mengemas Kampung KB bukan menjadi program KKKBPK semata, melainkan program pemberdayaan yang bisa memajukan desa dan juga mensejahterakan masyarakat.

“

“Saya memberikan semangat kepada warga, Saya bilang bila Kampung KB kita berhasil janganakan dukungan untuk mendapatkan air bersih yang didapat. Insya Allah dukungan lain pun bisa kita raih untuk memajukan kampung ini,” ujarnya.

”



3. Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pelaksanaan program/kegiatan Kampung Keluarga Berencana dilakukan dengan mengintegrasikan program KKBPK dan sektor pembangunan lainnya melalui pendekatan 8 Fungsi Keluarga.

8 FUNGSI KELUARGA:

1. Agama
2. Reproduksi
3. Kasih Sayang
4. Perlindungan
5. Pendidikan
6. Sosial Budaya
7. Ekonomi
8. Pelestarian lingkungan



Peran Tenaga Lini Lapangan dalam Sosialisasi Kampung KB

Dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana peran Tenaga Lini Lapangan lebih ditekankan pada pendampingan dan pembinaan Pokja Kampung Keluarga Berencana sesuai tupoksinya selama ini, yaitu sebagai petugas pengelola dan pelaksana program KKBPK di tingkat kecamatan dan desa.

Kegiatan pendampingan dan pembinaan Pokja Kampung Keluarga Berencana, antara lain adalah KIE Individu/Kelompok dan Konseling KB, Pengembangan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS serta kegiatan sektor terkait lainnya.

Contoh Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana

Desa Lantung, Kecamatan Lantung di Kabupaten Sumbawa, telah berubah 180 derajat. Desa yang dikenal sangat jauh di pelosok, dengan akses jalan yang belum beraspal, ditambah sulit air, kini telah berubah menjadi salah satu desa agrowisata ternama di Kabupaten Sumbawa.

Inovasi melalui Kampung Keluarga Berencana yang dilakukan Desa Lantung melalui pemanfaatan pekarangan dan pagar rumah warga sebagai tempat menanam sayuran dengan konsep hidropnik dan akuaponik yang menggunakan pupuk organik merupakan terobosan yang berani karena desa ini dikenal sangat sulit air, bahkan area persawahan disana menggunakan konsep sawah tadah hujan, yang penanamannya dilakukan hanya pada saat musim hujan.

Awalnya tidak 100% warga yang melakukan penanaman sayuran di pekarangan. Namun, setelah mereka mendapatkan sosialisasi yang dikemas secara menarik dan melihat hasil sayuran yang dihasilkan sangat bermanfaat, bisa memperindah rumah dan juga dapat dikonsumsi pribadi, maka warga lain akhirnya tertarik melakukan hal itu.

Berbekal semangat yang kuat dari warga setempat dan dukungan dari berbagai pihak, setiap hari minggu pagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selalu mengumpulkan hasil penanaman sayuran untuk dipasarkan ke Sumbawa Besar. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga. Langkah tersebut disambut baik oleh warga diluar Desa Lantung, karena sayuran yang dihasilkan bebas dari pestisida.



Pemanfaatan Pekarangan Warga untuk kebun sayur-mayur
Kampung KB Desa Lantung, Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat

MONITORING DAN EVALUASI

PENGERTIAN MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berencana, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun agar semua pihak yang terlibat dan terkait dalam program/kegiatan dapat memantau perkembangan dan keberhasilannya.

MONITORING

Monitoring adalah kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana pelaksana program (Pokja) mengatasi hambatan tersebut.

Pelaksanaan monitoring Kampung KB dapat dilakukan melalui kegiatan seperti pertemuan rutin Pokja, yang dihadiri seluruh pengurus dan anggota Pokja.

EVALUASI

Evaluasi adalah proses untuk menentukan apakah sebuah program, baik yang sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan sudah mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat secara obyektif dan sistematis.

Pelaksanaan evaluasi Kampung KB dapat dilakukan melalui pertemuan yang mengundang berbagai pihak yang terlibat dalam Kampung KB, termasuk lintas sektor dan masyarakat.

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Kampung Keluarga Berencana mencakup:

- Sistem Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana
- Sistem Advokasi, Penggerakan dan Informasi
- Sistem Pelayanan terkait Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
- Sistem Pelayanan terkait bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain yang melibatkan lintas sektor

Peran Tenaga Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi

Memonitoring pelaksanaan program/ kegiatan Kampung Keluarga Berencana di Tingkat Desa melalui

1. Pertemuan rutin bulanan Pokja
2. Laporan rutin bulanan Pokja dengan format yang telah disediakan, yang kemudian diserahkan ke tingkat Desa/Kelurahan dan ke tingkat Kecamatan melalui Tenaga Lini Lapangan dengan tembusan ke Kepala UPTD masing-masing instansi pemerintah/lembaga terkait
3. Mengkoordinir PKKBD, Sub-PKKBD dan Kader untuk melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Kampung Keluarga Berencana.
4. Membuat laporan Kampung Keluarga Berencana – termasuk rekomendasi dan RTL melalui aplikasi data basis laporan Kampung Keluarga Berencana secara on line di <http://kampungkb.bkkbn.go.id>.

Dalam website tersebut Tenaga Lini Lapangan adalah pengisi konten yang diberikan kewenangan oleh OPD KB Kabupaten dan Kota untuk membuat laporan kondisi, intervensi dan kegiatan Kampung Keluarga Berencana di wilayahnya.



Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat.

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas

<http://kampungkb.bkkbn.go.id.>

Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan di Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu alat untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi. Hasil dari pencatatan dan pelaporan tersebut kemudian direkap dan dianalisa guna bahan pembelajaran yang dapat menunjang pengembangan program/kegiatan.

PENCATATAN

Format pencatatan tidak diatur secara khusus, namun bentuk yang disarankan pencatatan mencakup:

- a. Buku tamu
- b. Buku kegiatan per seksi, memuat:
 - No kegiatan
 - Hari/tanggal kegiatan
 - Nama Kegiatan
 - Sasaran Kegiatan
 - Mendukung Program (BKB/BKR/BKL/PIKR/UPPKS/Lintas sektor)
 - Tempat penyelenggaraan
 - Keterlibatan lintas sektor
- c. Buku peserta kegiatan per seksi
- d. Buku data kependudukan

PELAPORAN

Pelaporan, dalam proses pelaporan online. Hal-hal yang dilaporkan diantaranya:

1. Profil Kampung KB → sistem *updating* (diperbaharui)
2. Profil Penduduk → sistem *updating* (diperbaharui)
3. Intervensi Kegiatan → *real time* (waktu sebenarnya)
4. Capaian kegiatan → bulanan

PENUTUP



Program Kampung Keluarga Berencana dikembangkan sebagai upaya untuk merevitalisasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang selama beberapa dasawarsa terakhir mengalami kemunduran.

Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu strategi guna menunjang capaian program KKBPK dan program pembangunan sektor terkait lainnya diseluruh tingkatan wilayah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan bagi Tenaga Lini Lapangan sebagai petugas pengelola dan pelaksana program KKBPK di tingkat kecamatan dan desa.



LAMPIRAN

Program-program Berbasis Desa/Kelurahan di Berbagai Kementrian/Lembaga yang Berpotensi Disinergikan dengan Kampung Keluarga Berencana

1. Kampung Keluarga Berencana (BKKBN),
2. Desa Mandiri, Desa Sehat (Kemendesa & PDTT),
3. Desa Sejahtera Mandiri (Kemensos),
4. Desa Tangguh Bencana (BNPB),
5. Desa Siaga (Kemenkes),
6. Desa Keluarga Sakinah (Kemenag),
7. Desa Inovasi (Kemenristek Dikti),
8. Lapangan Desa (Kemenpora),
9. Agroindustri Pedesaan (Kementan),
10. Desa Wisata (Kemenpar),
11. Desa Industri Mandiri (Kemenperin),
12. Desa Mandiri Energi (Kemen ESDM),
13. Kampung Iklim (KLHK),
14. Pasar Rakyat (Kemendag),
15. Satu Desa Satu Produk – OVOP (Kemenkop UKM),
16. Desa Pesisir Tangguh (KKP),
17. PISEW & Bedah Rumah (Kemen PUPR),
18. TNI Manunggal Membangun Desa – TMMD (Kemenhan),
19. Desa Sadar Hukum (Kemenkumham),
20. Desa Pilot, Desa Padat Karya Tunai (Kemenko PMK)

Contoh SK Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Kampung KB



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA GADEN
KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 17 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG KB DI DESA GADEN
TAHUN 2017**

KEPALA DESA GADEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti sunt Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional tanggal 2 Februari 2016 Nomor : 109/RC.300/B1/2016 Perihal Penanganan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana mengamanatkan dalam rangka pengembangan kegiatan prioritas pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk dapat dilaksanakan di seluruh tingkatan wilayah, maka seluruh kabupaten/kota di setiap kecamatan di Indonesia agar membentuk Kampung Keluarga Berencana pada Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan 1 (satu) RW di Desa Gaden sebagai Kampung Keluarga Berencana di Desa Gaden Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menyatakan :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan RW 05 Dukuh Gaden, Desa Gaden Kecamatan Trucuk sebagai Kampung Keluarga Berencana di Desa Gaden Tahun 2017 dengan susunan pengurus terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Pengurus sebagaimana dimaksud pada dikti KESATU Keputusan ini bertugas mengelola Kampung KB sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Kampung KB yang dikeluarkan oleh BKKBN tahun 2017.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gaden

Pada tanggal 15 Agustus 2017

KETUA DESA GADEN

H. PARTINAIL, S.T.M.M.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA GADEN
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
 DI DESA GADEN TAHUN 2017

SUSUNAN PENGURUS
 KAMPUNG KB RW 05 DUKUH GADEN DESA GADEN
 KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Hj. Partinah, ST,MM	Kepala Desa
2.	Penasehat	1. Mujahid 2. Juwito, ST	Kaur Umum / Pk. Sekdes Ketua RW 05
3.	Pembina	1. Sugiyanta 2. Rizky Maria Ulfa 3. DwiRaharjo	PLKB Kec. Trucuk Bhdan Desa Gaden Fasilitator
4.	Petugas Lini	Smarti	Sub. PPKBD Gaden
5.	Ketua	Edi Heruning Saputro	Tokoh Masyarakat
6.	Sekretaris	Nur Zain	Tokoh Masyarakat
7.	Bendahara	Jumbadi Purwo Diharjo	Ketua RT 14
8.	Kelempok Kerja (Pokja)		
	1. Pokja Keagamaan	Endik Sukiman	Tokoh Masyarakat
	2. Pokja Sosialisasi / Pendidikan	Arka Nugroho	Tokoh Masyarakat
	3. Pokja Reproduksi	DwiWati	Kader Posyandu
	4. Pokja Ekonomi	Sugiyanta	Ketua RT 16
	5. Pokja Pertindungan	Yanto Winarno Himar	Hansip
	6. Pokja Kasih Sayang	Endang	Kader Posyandu
	7. Sosial Budaya	Jaka Sulistiya	Tokoh Masyarakat
	8. Pokja Pembinaan Lingkungan	Sriyanto	Ketua RT 15

KEPALA DESA GADEN


 HJ. PARTINAH, ST, MM

DAFTAR SINGKATAN

A

ADD: Alokasi Dana Desa
APBDesa: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD I: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota
APBD II: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tingkat Provinsi
APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

BPD: Badan Pemusyawaratan Desa
BKB: Bina Keluarga Balita
BKR: Bina Keluarga Remaja
BKL: Bina Keluarga Lanjut Usia
BOKB: Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BUMDes: Badan Usaha Milik Desa
Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPS: Badan Statistik
Babinsa: Bintara Pembina Desa
Bhabinkamtibmas: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BKKBN: Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
BNPB: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

C

CSR: Corporate Social Responsibility
Mix
IUD: Intraurine Device

D

DinKes: Dinas Kesehatan
DPMPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Danramil: Komandan Rayon Militer
DAK: Dana Alokasi Khusus

H

HPK: Hari Pertama Kelahiran

I

IBI: Ikatan Bidan Indonesia
IDI: Ikatan Dokter Indonesia
IMP: Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan

K

KB: Keluarga Berencana
KKBPK: Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Kades: Kepala Desa
Kasi Kesra: Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Kapolsek: Kepala Kepolisian Sektor
KUA: Kantor Urusan Agama
Kemendesa & PPTD: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemensos: Kementerian Sosial
Kemenkes: Kementerian Kesehatan
Kemenag: Kementerian Agama
Kemeristek Dikti: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemenpora: Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Kementan: Kementerian Pertanian
Kemenpar: Kementerian Pariwisata
Kemenparin: Kementerian Perindustrian
Kemen ESDM: Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral
KLHK: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kemendag: Kementerian Perdagangan
Kemenkop UKM: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KKP: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemen PUPR: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemenhan: Kementerian Pertahanan
Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenko PMK: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

L

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

M

Musrenbang: Musyawarah Rencana Pembangunan

O

OPD: Organisasi Perangkat Daerah

P

PKB: Penyuluh Keluarga Berencana
PLKB: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PPKBD: Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
PIK-R: Pusat Informasi dan Konseling - Remaja
PUS: Pasangan Usia Subur
Poktan: Kelompok Kegiatan
Pokja: Kelompok Kerja

Pokjanis: Kelompok Kerja Teknis
PKK: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu
POGI: Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
Permendesa: Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

R

RT: Rukun Tetangga
RW: Rukun Warga
RKPDes: Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
RPJM: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTL: Rencana Tindak Lanjut

S

SK: Surat Keputusan
Susenas: Survei Sosial Ekonomi Nasional
Sub PPKBD: Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

T

TP PKK: Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Toga: Tokoh Agama
Toma: Tokoh Masyarakat
Todat: Tokoh Adat

U

UPPKS: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
UPT: Unit Pelaksana Teknis
UPTD: Unit Pelaksana Teknis Daerah

